

**PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB**  
**Jalan Kartini No. 02 Singaraja**

Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447  
Website : [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id) - Email : [psingaraja@yahoo.co.id](mailto:psingaraja@yahoo.co.id)

---

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS SURVEY**  
**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**

**TRIWULAN III**



**Disusun Oleh :**

**TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
**PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B**

**TAHUN 2025**

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan public akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

#### **Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja**

No	Ruang Lingkup	Nilai rata-rata IPK	IPK Tertimbang
1	Manipulasi Peraturan	4,000	0,400
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	0,400
3	Menjual Pengaruh	4,000	0,400
4	Transaksi Biaya	3,984	0,398
5	Biaya Tambahan	4,000	0,400
6	Hadiah	4,000	0,400
7	Transparansi Biaya	4,000	0,400
8	Percaloan	4,000	0,400
9	Perbuatan Curang	4,000	0,400
10	Transaksi Rahasia	4,000	0,400
Jumlah		40,000	4,000
<b>INDEKS PERSEPSI KORUPSI</b>			<b>4,00 / 99,96%</b>

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja sebesar **4,00 / 99,96%**

Tiga unsur terendah Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi yaitu:

1. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks nilai 736 dengan indeks sebesar 3,984.
2. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks nilai 764 dengan indeks sebesar 4,000.
3. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks nilai 736 dengan indeks sebesar 4,000.

Tindak lanjut dari tiga unsur yang bernilai rendah diatas telah dilakukan dengan cara:

1. Dibuatkan banner yang berisikan biaya-biaya yang ada di Pengadilan dan ditempatkan pada ruang pelayanan dan segala informasi yang mengenai biaya-biaya telah dimasukkan dalam WEBSITE Pengadilan Negeri Singaraja;
2. Telah disediakan brosur dan standar pelayanan pada masing-masing meja PTSP yang memuat prosedur pelayanan secara jelas dan rinci termasuk dasar hukumnya sebagai pedoman Petugas PTSP dalam melayani masyarakat sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
3. Telah dilakukan briefing secara rutin setiap hari kerja pagi dan sore serta pengawasan oleh Penanggung Jawab PTSP dan Pengawas PTSP serta mengingat visi dan misi PN Singaraja Kelas IB mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil kinerja yang baik, transparan, dan berkualitas sesuai tugas pokok masing-masing.

Demikian Tindak Lanjut hasil survey yang dilakukan diharapkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK (Wilayah Bebas Dari Korupsi) Dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani) di Lingkungan wilayah Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

Singaraja

30 September 2025

Koordinator Tim Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi,



Ketut Maliastira